

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELURAHAN PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

TESIS



OLEH :

**ZAINUDDIN NASUTION
NPM : 041801008**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

N A M A : ZAINUDDIN NASUTION
N P M : 041801008
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL : Implementasi Program Pemberdayaan
Kelurahan Pada Pemerintah Kota
Medan

Pembimbing I,



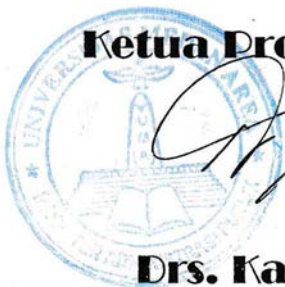
Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Pembimbing II,



Drs. Kariono, MA

Ketua Program Studi,

Drs. Kariono, MA

ABSTRAK

ZAINUDDIN NASUTION

NPM : 041801008

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Pemerintah kota Medan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kaitan ini Pemerintah kota Medan melaksanakan berbagai program yang bersentuhan dengan maksud dan tujuan tersebut khususnya ditingkat yang terendah yakni pemerintah kelurahan.

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah kelurahan dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Pemerintah kota Medan kepada mereka yang diapresiasi melalui program pemberdayaan kelurahan.

Penelitian Tesis ini berbentuk kualitatif, dimana data-data yang diperoleh secara langsung dari responden dipaparkan secara eksplanatif. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 orang dan merupakan staf di kantor kelurahan yang menjadi obyek penelitian ini. Penentuan sampel dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode *Cluster Random Sampling*. Sedangkan Analisa Data dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul melalui Observasi, Interview dan penyebaran kuisisioner serta dokumentasi.

Hasil penelitian Tesis ini membuktikan bahwa implementasi program pemberdayaan kelurahan pada pemerintah kota Medan belum terealisasi dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan masyarakat tersebut. Oleh karena itu kepala kelurahan (Lurah) sebagai administrator pembangunan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mensukseskan program pemberdayaan kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidyah Nya sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan Salam semoga disampaikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya, amiin.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan persyaratan mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada program Pascasarjana (S2) di Universitas Medan Area (UMA) Medan. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian Tesis ini diberi judul "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN"

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengalami berbagai kendala yang cukup berarti, terutama dalam membagi waktu antara *Studi*, *Karir* dan *Keluarga*. Namun berkat dukungan serta dorongan berbagai pihak terutama dari keluarga, teman-teman (di UISU, UMA, PPP, DPRD kota Medan), para Dosen Senior maupun Junior, sahabat seperjuangan dan sepergaulan serta mereka yang tak disebutkan jati dirinya turut memberi andil hingga penelitian Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Seiring dengan selesainya penyusunan Tesis ini, maka patutlah kiranya penulis mengungkapkan pernyataan yang tulus yakni TERIMA KASIH kepada mereka yang telah dengan tulus pula menaburkan kontribusinya sehingga mempercepat proses penyelesaian tugas ini. Secara khusus ungkapan

terimakasih ini penulis sampaikan kepada Bapak Drs.M. Ridwan Rangkuti,MA selaku Dosen Pembimbing I, yang lebih dari sekedar dosen pembimbing dan teman berdiskusi diluar kampus. Bapak Drs. Kariono, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Pinta Wildan Adelina Siregar, S.Sos, MAP, sahabat seperjuangan di dua kampus (UISU & UMA).

Secara khusus Salam ta'zim ananda haturkan kepada Ayahanda Ahmad Jauhari Nasution dan Ibunda Saniah yang terus mengiringi langkah kaki ananda dengan lantunan do'a-do'a dalam mengharungi samudera cita-cita. Teristimewa pula untuk isteriku tercinta *Milha Masduki* yang mendampingi penulis dengan penuh kesabaran, anak-anakku tersayang *Zaimilatun Nuri Zainasti (ai)*, *Muhammad Irham Maulana Nasution (iam)*, *Muhammad Fadhil Akbar Nasution (fadhil)* dan *Ratu Ayu Zaskia Maulida (ratu)* yang menjadi sumber inspirasi, motivasi dan inovasi penulis yang tiada pernah kering.

Atas segala bantuan yang telah diberikan dalam rangkaian penelitian Tesis ini sejak awal hingga akhir tentunya tiada pernah penulis lupakan dan hanya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga Ia memberikan balasan yang berlipat ganda disisi Nya, amiin.

Medan, 29 Agustus 2007.

Penulis,



Zainuddin Nasution

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori <i>Tinjauan Pustaka</i>	6
E.1. Kebijakan Publik	6
E.2. Proses Kebijakan Publik	7
E.3. Implementasi Kebijakan	8
E.4. Model-Model Implementasi Kebijakan	10
F. Definisi Konsep	18
G. Definisi Operasional	19
H. Sistematika Penulisan	21 ✓
BAB II : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	22
B. Bentuk Penelitian	22
C. Populasi dan Sampel	22
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	23
E. Teknik Analisa Data Kualitatif	24
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Medan	26
B. Kecamatan dan Kelurahan	27
B.1. Kecamatan Medan Maimun.	28
B.1.1. Kelurahan Kampung Baru	28
B.1.2. Kelurahan Aur	37
B.2. Kecamatan Medan Tembung	46
B.2.1. Kelurahan Sidorejo Hilir	46
B.2.2. Kelurahan Tembung	55
C. Program Pemberdayaan Kelurahan	64

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Data Distribusi Tentang Identitas Responden.....	74
B. Data Distribusi Jawaban Responden Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Maimun dan Medan Tembung	77
BAB V : ANALISA DATA	92
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
RIWAYAT HIDUP	100
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah Kota dan daerah Kabupaten. Masing-masing daerah pada dasarnya memiliki sifat otonom dan administratif.

Dalam kedudukannya sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota. Sedangkan sebagai daerah administrasi menyelenggarakan kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Sedangkan daerah kabupaten dan kota pada dasarnya diberi keleluasaan untuk menyatakan tidak atau belum mampu menyelenggarakan pemerintahan tertentu (melalui prosedur *bottom up*), sehingga wewenang di bidang pemerintahan tertentu tersebut dapat menjadi wewenang daerah provinsi.

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Abdullah, 2000 : 160) yang disesuaikan dengan keadaan yang nyata dan perkembangan serta kemampuan daerah. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya pergeseran kewenangan dari yang semula didominasi pusat kepada daerah, dan dari daerah ke masyarakat. Pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan teknis pemerintahan merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya pemerintahan daerah di Indonesia.

Suasana kejiwaan dan kebatinan inilah yang pada dasarnya menjadi semangat penyusunan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999, yang saat ini berlaku sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa implikasi baik secara filosofis maupun administratif tidak hanya dari sentralisasi menjadi desentralisasi akan tetapi perkembangannya peran masyarakat menjadi demokratis partipatif. Secara umum perubahan tersebut membawa implikasi bahwa persoalan diselesaikan ditingkat lokal, semua daerah harus berkembang dengan prakarsa daerah masing-masing, merubah pandangan kesatuan yang semula harus sama menjadi pengakuan adanya keanekaragaman sebagai potensi bangsa, adanya pergeseran dominasi eksekutif menjadi keseimbangan dengan legislatif dan perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan pemerintah dengan pembangunan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Faturochman, Setiadi, dkk, 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya
- Gaspersz, Vincent, 1991, *Teknik Penarikan Contoh Untuk Penelitian Survei*, Tarsito, Bandung
- Ibrahim, Amin, 2004, *Pokok Analisis Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung
- Jones. O. Charles, 1991, *Kebijakan Publik*, Rajawali, Jakarta
- Kaloh. J, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ketaren, Nurlela, 1999, *Administrasi Pembangunan*, FISIPOL USU, Medan
- Malaranggeng, Andi Alfian, 2004, *Otonomi Daerah*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Musaneff, 1985, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Nazier, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Parson, Wayne, 2005, *Public Policy*, Kencana, Jakarta
- Putra, Fadhilah, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Santoso, Gempur, 2005, *Metodologi Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sumaryadi, I., Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta

Sunardjo, Unang, 1984, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung

Supranto, J., 1997, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta

Syafie, Inu Kencana, Tanjung, Djameluddin, Modeong, Supardan, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta

Syaukani, Gaffar, Afan, Ryaas, M., Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tangkilisan S, Hessel Nogi, 2005, *Manajemen Publik*, Grassindo, Jakarta

Thoha, Miftah, 1983, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Fisipol UGM, Yogyakarta

Widarta, 2005, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Pondok Edukasi, Yogyakarta.

www.pemkomedan.go.id

Undang-undang/Perda/Keputusan Kepala Daerah

Intruksi Walikota Medan No. 141/079/INST/2001

Intruksi Walikota Medan No. 141/1417/INST/2001

Surat Keputusan Walikota Medan No. 141/084/SK/2001